



Article Informations
Corresponding Email:
kemalabdurahman66@gmail.com

Received: 10/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PERAN PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMC) DALAM STUDI KASUS : INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK TAHUN 2003-2008

Kemal Abdurahman Permedi¹, Yusep Ginanjar², Taufan H Akbar³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstract

The United States' aggression against Iraq raised many questions about the explanations for why the US aggression occurred against Iraq. The triggering factors for declaring war against Iraq were multifaceted, including political, economic, ideological, and strategic positions. This undergraduate thesis aims to find the factors that caused the aggression of the US military forces against Iraq as well as the US government policies toward Iraq which were based on various interests. This research uses the theory of realism in international relations that is based on the pursuit of national interests and national security. The research concluded that the US aggression against Iraq in 2003-2008 period was based on the interest of US hegemony in the Middle East.

Keywords : *US Aggression against Iraq, Roles of Private Military Companies, National Interest, neorealist theory.*

Abstrak

Agresi Amerika Serikat terhadap Irak menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penjelasan mengapa terjadi agresi AS terhadap Irak. Faktor pemicunya mendeklarasikan perang terhadap Irak bersifat multifaset, meliputi politik, ekonomi, ideologi, dan posisi strategis. Skripsi ini bertujuan untuk menemukan peran Perusahaan Militer Swasta (Private Military Companies/PMC) dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Irak serta kebijakan pemerintah AS yang didasarkan pada berbagai kepentingan. Penelitian ini menganalisis menggunakan teori neorealisme dalam hubungan internasional yang didasarkan pada kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Penelitian menyimpulkan bahwa peran PMC dalam invasi AS terhadap Irak periode 2003-2008 didasarkan pada kepentingan hegemoni AS di Timur Tengah.

Keywords : Agresi Amerika Serikat terhadap Irak, Peran Perusahaan Militer Swasta, Kepentingan Nasional, Teori Neorealisme

PENDAHULUAN

Tentara bayaran (*mercenaries*) adalah salah satu aktor yang terlibat dalam perang selama berabad-abad. Sebelum abad ke-17, jasa tentara bayaran digunakan untuk berpartisipasi dalam perang, untuk melindungi wilayah dan properti.¹ Mercenary mempunyai definisi yang beragam, namun secara umum mercenary dikenal dengan istilah *soldier of fortune* atau tentara yang bekerja untuk keuntungan pribadi. Tentara bayaran mengacu pada individu, meskipun pada kenyataannya, tidak jarang kita menemukan mereka dalam berbagai kelompok, yang bekerja secara independen sebagai spesialis angkatan bersenjata dengan kepemilikan aset yang terbatas, struktur organisasi informal, dan tidak memiliki identitas korporat.

Setelah tahun 1990 yang menandai berakhirnya Perang Dingin, perubahan politik global lantas mempengaruhi kinerja tentara bayaran. Perusahaan Militer Swasta (PMS) mulai berekspansi ke perusahaan perusahaan ini dan merekrut tentara bayaran yang semula bekerja secara mandiri kedalam struktur korporasi yang jelas. Berakhirnya Perang Dingin menandai dimulainya PMS setidaknya ada dua alasan : pertama, setelah berakhirnya Perang Dingin banyak negara besar yang sebelumnya terlibat dalam Perang Dunia kemudian mengurangi jumlah tentara nasionalnya. Kekuatan militer global, yang berjumlah 6.873.000 tentara pada tahun 1990 menurun secara signifikan menjadi sekitar 3.283.000 tentara pada tahun 1997.² Kedua, akibat

¹ Schreier, F. & Caparini, M. Privatising Security: Law, Practice, and Governance of Private Military and Security Companies. *Occasional Paper of Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces DCAF no.6*, 2005.

²Blakely, G. Marketized Soldiering: How Private Military Companies Challenge Global Governance, Erode Accountability and Exacerbate Conflict. *Master of Arts, Simon Fraser University, Burnaby*, 2006.

pengurangan tentara nasional, banyak professional yang kehilangan pekerjaan. Para ahli ini memimpin dalam merancang PMS.

Tentara bayaran dan PMS memiliki peran yang hampir serupa dalam sebuah perang. Namun menurut Moller, meskipun tentara bayaran dan PMS berperang demi kepentingan mereka sendiri,³ terdapat banyak perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi keterlibatan dalam perang. Tentara bayaran seringkali bekerja secara langsung sebagai bagian dari pasukan bersenjata sedangkan PMS tidak hanya menyediakan jasa pasukan namun juga pelatihan pasukan termasuk pelatihan tentara nasional, kepemimpinan, perencanaan strategi, penelitian, analisis ancaman, dan pengembangan kemampuan lainnya seperti penerbangan, artileri, pengembangan kemampuan inteligen, sertakomunikasi.⁴

Variasi peran PMS dapat dilihat di banyak bidang dalam kasus Perang Irak tahun 2003 hingga 2007. PMS telah memainkan peran penting sejak awal invasi Amerika Serikat di Irak.⁵ PMS memberikan fasilitas pelatihan militer, melakukan pengawasan dan merumuskan rencana dan menetapkan tujuan operasi sebelum kedatangan pasukan AS di Irak. Selama invasi, PMS mengendalikan dan memelihara sistem informasi dan senjata, memenuhi kebutuhan logistik, transportasi dan bahan bakar, dan menyediakan layanan medis. Begitu proses serangan berakhir, aktivitas PMS tidak berhenti, melainkan meningkat. Isenberg mengatakan penyebab situasi ini ada dua hal

³ Gama, S. A. H . Mercenarism and The Curbing of Mercenary Activity in Africa, 1990 to 2005: Selected Case Study. *Master of Security Studies, University of Pretoria*, 2008

⁴Gama. Mercenarism and The Curbing.

⁵ Blakely, G. Marketized Soldiering: How Private Military Companies Challenge Global Governance, Erode Accountability and Exacerbate Conflict. *Master of Arts, Simon Fraser University, Burnaby*, 2006.

utama, yaitu jumlah pasukan nasional Amerika yang berkurang dari jumlah yang diperlukan dan upaya penerapan demokrasi di Irak memerlukan proyek rekonstruksi besar-besaran karena PMS diperlukan untuk memberikan perlindungan untuk perusahaan konstruksi.⁶ Selain itu, pada masa Perang Irak, pemerintah Amerika Serikat tidak mendapat dukungan atau kerjasama dari negara lain, sehingga kekurangan militer hanya dapat ditutupi dengan menggunakan jasa PMS.⁷ Perang Irak menjadi salah satu faktor yang menjadi awal berkembang pesatnya PMS.

Di antara jumlah PMS yang bekerja selama Perang Irak pada tahun 2003-2007, tiga PMS Amerika yang menandatangani kontrak terbesar dengan Pemerintah. Di antara jumlah PMS yang bekerja selama Perang Irak tahun 2003-2007, tiga PMS Amerika yang menandatangani kontrak terbesar dengan Pemerintah Amerika Serikat adalah DynCorp, Blackwater, dan Triple Canopy yang menyediakan layanan keamanan swasta untuk pejabat pemerintah antara lain diplomat Amerika Serikat dan pejabat tinggi negara.⁸ Ketiga perusahaan ini menandatangani kontrak dalam kerangka Worldwide Personal Protective Service (WPPS II).⁹ Congressional Research Service (CRS) memperkirakan bahwa dari total 60 PMS yang beroperasi di Irak pada tahun 2004, 20 di antaranya menandatangani kontrak langsung dengan Departemen Pertahanan (Department of Defense) dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (State Department/DoS).¹⁰

⁶ Ibid hal.12

⁷ Singer, P. W. *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Updated ed. New York: Cornell University Press, 2008.

⁸ Berndtsson, J. *The Privatisation of Security and State Control of Force: Changes, Challenges and the Case of Iraq*. Doctoral, University of Gothenburg, Goteburg, 2009.

⁹ Berndtsson. *The Privatisation of Security*.

¹⁰ Ibid hal.34-35

Selain penandatanganan perjanjian dengan DoS, PMS juga mendapat perjanjian dengan CPA (Coalition Provisional Authority), hingga penutupannya pada tanggal 28 Juni 2004), USAID, dan DoD.¹¹ CPA telah memberikan kontrak kepada perusahaan-perusahaan seperti Erinys untuk menjaga tambang minyak, Global Risk Strategies untuk menukarkan surat-surat bank, Custer Battles untuk melindungi bandara udara internasional Baghdad, DynCorp untuk melatih polisi Irak, dan Vinnel dan MPRI untuk melatih pasukan tentara Irak yang baru.¹² Aegis Defence Services Ltd., yang merupakan salah satu PMS di Inggris, memegang kontrak yang besar dengan bekerja dibawah DoD secara langsung dalam kerangka kontrak kerjasama dengan departemen pertahanan yang disebut *Reconstruction Security Support Services* (RSSS).

Sebagai bagian dari kontrak RSSS, Aegis menyediakan layanan manajemen keamanan yang mendukung tindakan anti terorisme, perlindungan pribadi, perlindungan berupa pengawalan, dan manajemen program keamanan.¹³ Aegis menerima kontrak tambahan dengan bergabung menandatangani RSSS II pada akhir tahun 2007.

Peran PMS pada Perang Irak tahun 2003-2007 lebih luas dibandingkan pada perang-perang yang sebelumnya.¹⁴ PMS melakukan operasi garda depan termasuk memberikan layanan keamanan Coalition Provisional Authority (Blackwater), melatih pasukan tentara baru Irak (Vinnel,MPRI), dan menginterogasi tawanan (CACI). Meskipun biaya perangnya tinggi pada Perang Irak tahun 2003-2007 , Amerika Serikat tetap menggunakan layanan PMS karena perannya sebagai instrumen penyerangan utama. Singer bahkan mengklaim tanpa adanya PMS, invasi Amerika Serikat ke Irak tidak akan

¹¹ Anonymous. 2005.

¹² Ibid hal.14

¹³ Berndtsson. *The Privatisation of Security*.

¹⁴ Blakely, G. *Marketized Soldiering: How Private Military Companies Challenge Global Governance, Erode Accountability and Exacerbate Conflict*. *Master of Arts, Simon Fraser University, Burnaby*, 2006.

mungkin terjadi.¹⁵

Perang Irak menjadi ladang keuntungan bagi PMS dan dalam waktu singkat, bisnis militer ini berkembang pesat dan diperkirakan pada tahun 2007 keuntungan perusahaan bisa mencapai \$20.1 milyar.¹⁶ Pada tanggal 4 Mei 2004, Secretary of Defense, Donald Rumsfeld mengatakan kepada Chairman of The House Armed Services Committee, Ike Skelton, CPA dan MOI (Iraq Ministry of Interior) bahwa ada 60 PMS yang beroperasi di Irak dengan total operasi pekerja sekitar 20.000 orang. Dari 20.000 personel aktif, Singer (2004) menyebutkan sekitar 6.000 personel PMS yang terlibat dalam operasi militer dan memiliki persenjataan. Rasio personel PMS dengan pasukan tentara nasional Amerika Serikat adalah 1:10. Data lain menunjukkan bahwa jumlah pasukan bersenjata PMS yang bekerja untuk DoD Amerika Serikat berjumlah sekitar 8.500. Menurut survey yang dilakukan oleh Director of Private Security Company Association in Iraq pada tahun 2006 ada sekitar 181 PMS dengan estimasi pekerja sekitar 48.000 personil. Tahun 2007, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) menemukan sekitar 180.000 personil PMS yang beroperasi di Irak.

Oleh karena itu, keragaman peran PMS dalam perang semakin meningkat. Secara umum, peran PMS baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lembaga negara yang memiliki hubungan dengan aktor seperti polisi dan militer. PMS yang memberikan pelayanan militer untuk pertempuran dan pelatihan militer, kini ikut serta dalam inisiasi perang dan operasionalisasi alat-alat teknologi termasuk dalam tahap pengembangan strategi perang yang akan dilakukan. PMS bukan satu-satunya pasukan yang berkontribusi dalam sebuah perang namun PMS juga berperan penting dalam

¹⁵ Singer, P. W. *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Updated ed. New York: Cornell University Press, 2008.

¹⁶ Ibid hal.45

Perang Irak tahun 2003-2008.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang lebih memperhatikan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena. Metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilakukan oleh satu maupun sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Alasan lainnya pun menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan mendeskripsikannya. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks¹⁷. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang Peran Private Military Companies dalam Invasi Amerika Serikat ke Irak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena dalam usulan penelitian ini peneliti menggunakan metode yang berupa data-data deskriptif yang didapatkan dari informan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata dan lisan dari masyarakat serta mengamati perilaku yang terjadi dalam masyarakat sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.¹⁸

Adanya hambatan dalam mencari data ilmiah di lapangan karena peneliti tidak bisa secara langsung menganalisis ke lapangan, namun banyak ciri-ciri dari proses penelitian ini yakni diantaranya penelitian ini dilakukan secara intensif, peneliti ikut serta mencari data-data dan teori dari berbagai sumber dan informasi di internet jurnal, artikel, berita yang sebagai landasan

¹⁷ Moleong, L. J. (2000). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹⁸ Melong, J. Lexy, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007) 4.

memperkuat argumentasi.¹⁹ Sesuai dengan ciri – ciri yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan secara intensif. Tujuan penelitian dilakukan secara intensif adalah peneliti sungguh-sungguh melakukan penelitian, peneliti juga berpartisipasi dalam mencari data ilmiah dari berbagai sumber berita, artikel, jurnal dan wawancara tanpa tatap muka dan pengajuan surat sebagai sarana untuk melakukan wawancara dengan informan, ciri selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap dokumen maupun informal yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang selanjutnya penulis buat laporan secara mendetail di dalam usulan penelitian ini.

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kejadian-kejadian berdasarkan data-data yang terkumpul kemudian di analisis keterkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini, Penelitian ini deskriptif menyajikan suatu gambar terperinci tentang situasi khusus, setting social.²⁰

Disamping berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi, tipe penelitian juga memberi gambaran menyeluruh mengenai situasi yang sedang dipelajari, dengan penggunaan metode penelitian dimaksudkan untuk bertujuan memberikan gambaran peristiwa-peristiwa secara cermat dan detail sehingga dapat di peroleh pemahaman tentang peristiwa yang telah terjadi.²¹ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan Peran PMC pada Invansi Amerika terhadap Irak pada tahun 2003-2008.

Teknik pengumpulan data merupakan indikator penting dalam melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang ingin dicapai. Dalam

¹⁹ Sugiyono, P. D. (2015). Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Skripsi, dan Disertasi.) 121

²⁰ Basorwi dan Surwati, Memahami Penelitian Kualitatif “, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)37.

²¹ Ibid.

melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca atau *research* dari studi literatur, yang mana teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dari beberapa dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dan diharapkan memberikan dukungan data yang diperoleh dari membaca buku-buku ilmu Hubungan Internasional hingga studi Keamanan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dokumen resmi negara dari pemerintahan atau data-data yang bersumber dari lembaga terkait dengan penelitian ini, peran media seperti yang dapat diambil melalui *website* di Internet, juga penelitian terdahulu. Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³

Pengecekan keabsahan data sangatlah penting agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawab kan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan langkah dalam mengurangi kesalahan di dalam data atau hasil penelitian, digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang sesuai dengan fakta dan realita. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti melakukannya dengan meningkatkan ketekunan yaitu membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi – dokumentasi yang terkait. Selain itu dalam pengujian kredibilitas terkait Peran Perusahaan militer swasta dalam invasi Amerika Serikat ke Irak yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Indonesia dengan berbagai cara dan berbagai

²² *Ibid.*, hlm. 244.

²³ *Ibid.*, hlm. 294.

waktu.²⁴Penerapan triangulasi sumber adalah pada saat Perusahaan militer swasta dalam invasi Amerika Serikat ke Irak maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh diselaraskan dengan informasi yang diperoleh dari beberapa informan lalu dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.²⁵

PEMBAHASAN

PERAN PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMC) DALAM STUDI KASUS : INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK TAHUN 2003-2008

Perusahaan militer swasta (PMC) adalah perusahaan atau korporasi yang menyediakan jasa dan keahlian dibidang anggota militer atau anggota sejenisnya.²⁶ Perusahaan-perusahaan ini juga dikenal sebagai *korporasi militer swasta, firma militer swasta, penyedia afal yang berguna militer*, dan secara lapang sebagai industri militer swasta. Jasa-jasa yang dinegosiasikan perusahaan militer swasta selang lain adalah afal yang berguna logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta afal yang berguna keamanan. Jasa PMC seringkali digunakan untuk mendukung operasi resmi suatu tingkatan bersenjata, namun seringkali digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya sebagai *bodyguard*. PMC adalah lembaga sipil yang diberi wewenang untuk bekerjasama dengan satuan militer di negerinya atau bahkan di negara lain, yang disetujui oleh departemen pertahanan. PMC terutama digunakan di zona konflik dengan intensitas rendah, ketika situasi ketergantungan pada angkatan senjata penuh dapat merugikan secara ekonomi, diplomatik, atau politik. Namun, lembaga-lembaga ini juga beraliansi dengan negara-negara untuk memberikan fasilitas pelatihan militer dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan.

²⁴ *Ibid*, 274.

²⁵ *Ibid*, 274.

²⁶ Peter W. Singer ([1 Maret 2005](#)). "[Outsourcing War](#)". *Foreign Affairs*.

Misalnya, Perusahaan militer swasta memberikan layanan perlindungan kemanan untuk presiden Afganistan, membangun penjara di Guantanamo Bay, dan menerbangkan helikopter dan pesawat terbang untuk menghancurkan perkebunan coca di Kolombia. Mereka juga bekerja pada sistem intelijen dan komunikasi di United States Northern Command di Colorado, yang bertanggung jawab untuk menanggapi agresi terhadap Amerika Serikat. Lembaga ini juga melatih tentara dan militer di negara-negara seperti Nigeria, Bulgaria, dan Taiwan. Industri militer swasta sudah menjadi industri yang menghasilkan lebih dari \$100 juta per tahun.²⁷

Perusahaan militer swasta juga dikenal sebagai *kontraktor militer swasta*, namun istilah ini semakin mengacu pada siapapun yang dipekerjakan atau didukung oleh perusahaan militer swasta. Perusahaan militer swasta termasuk dalam kategori yang sama dengan kontraktor pertahanan, namun kontraktor pertahanan berfokus pada penyediaan perangkat keras dan peralatan militer, serta layanan yang diperlukan untuk memelihara peralatan militer. Pada saat yang sama, perusahaan militer swasta menyediakan personel yang terlatih secara operasional dan taktis, termasuk pengalaman bertempur.

Dalam perkembangannya, PMSC terbagi menjadi dua kategori, yaitu PMSC aktif dan pasif. PMSC aktif bersedia membawa senjata dalam pertempuran, sedangkan PMSC pasif hanya fokus pada pelatihan dan masalah-masalah organisasi. PMSC tradisional cenderung melindungi bisnis atau properti dari aktivitas kriminal, sedangkan akhir-akhir ini PMSC mulai banyak terlibat di zona konflik.²⁸ PMSC dapat menyediakan layanan untuk pasar domestik atau beroperasi secara global. PSC

²⁷ Yeoman, Barry (1 Juni 2003). "Soldiers of Good Fortune". Mother Jones

²⁸ Doug Brooks, Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services, 25 Juli 2002, hlm. 3, International Peace operations Association (IPOA), dalam <http://stability-operations.org/>.

domestik biasanya menyediakan layanan keamanan statis dan keamanan pribadi bersenjata maupun tidak bersenjata, serta juga peralatan teknis seperti sistem pengawasan CCTV, dan sistem- sistem tombol panik. Pekerjaan ini paling sering ditemukan di negara-negara berkembang dan negara- negara transisional, namun semakin umum terjadi di negara-negara berkembang. PMSC internasional memiliki kantor pusat atau kantor di beberapa negara yang menyediakan “jasa keamanan premium” (*premium protective security services*) di lingkungan tinggi resiko dalam skala global. Biasanya, petugas PMSC memiliki latar belakang militer atau penegak hukum serta memiliki pengalaman substansial di lingkungan yang sering disebut “lingkungan tidak bersahabat” (*unfriendly neighbourhood*).

Bisnis privatisasi keamanan menawarkan peluang besar dan juga menimbulkan resiko yang berat, terutama dari perspektif keamanan manusia. PMSC dapat memperbaiki situasi keamanan jika layanannya disampaikan secara profesional dan akuntabel, terutama jika lembaga negara yang demokratis dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan. Namun, keamanan swasta dapat memperburuk ketegangan sosial yang ada jika keamanan menjadi komoditas yang hanya mampu dijangkau oleh kaum kaya, sehingga banyak orang tidak dapat mengakses manfaatnya. Selain itu, status mereka di mata hukum internasional mengikat mereka untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Tidak hanya itu, PMSC yang memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga negara dapat memperburuk dan menguatkan praktek dan mekanisme penindasan dari sektor keamanan suatu negara, khususnya di negara-negara yang berkonflik.

Sebelum mengatur PMSC dalam konvensi internasional, pengertian tentara bayaran telah dibahas dalam dua konvensi internasional yang bertujuan untuk menghilangkan mereka dari kriminalisasi kegiatan tentara bayaran (di luar Konvensi Jenewa dan

Protokol Tambahan yang sudah dibahas sebelumnya). Kedua konvensi tersebut : Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*),²⁹ kemudian Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*).³⁰

Faktanya, sejak berakhirnya Perang Dingin, tentara bayaran perlahan juga mulai menghilang. Era perusahaan militer dan industri keamanan swasta mulai muncul, ditandai dengan permintaan terhadap PMSC yang meningkat cukup tajam. Industri PMSC menyediakan berbagai jenis layanan keamanan, dengan tenaga kerja sekitar 10.000 orang, menjadikannya inovasi baru di tengah meningkatnya jumlah konflik bersenjata di dunia pasca perang dingin.³¹ Kemudian, dalam

²⁹ Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*), 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001., dalam <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>, diunduh pada 2 Februari 2013.

³⁰ Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985), dalam http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention_on_Mercenaries.pdf, diunduh pada 5 Februari 2013.

³¹ ICRC, *The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict*, (Jenewa: International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs, 2009), hlm. 5. Penjelasan lebih lanjut tentang Montreux Document dapat ditemukan dalam website ICRC. Berikut tautannya: <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>, diunduh pada 29 Januari 2013.

perkembangannya pada September 2008, pemerintah Swiss dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* mengeluarkan *Montreux Document* yang membahas status PMSC berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.¹⁶ Mengenai Dokumen Montreux, semua personel PMSC mengesampingkan status mereka, harus mematuhi hukum humaniter internasional yang berlaku.

Keberadaan PMC yang seringkali terlibat dalam perselisihan internasional sebagai wujud penyediaan jasanya sangatlah mengkhawatirkan. PMC menjaga hubungan khusus dengan negara-negara kontraktor yaitu negara yang menggunakan jasa PMC. Bagi negara pengguna terdapat keuntungan sekaligus risiko dari penggunaan PMC. Negara negara yang menggunakan jasa layanan PMC memperoleh keuntungan ketika dalam kondisi konflik bersenjata.

Pemahaman tentang beberapa negara yang menggunakan PMCs menyatakan bahwa secara kenyataan PMCs tidak sama dengan tentara bayaran. Namun belum ada kesimpulan pasti tentang status PMCs sebagai tentara bayaran atau bukan. Hal ini dikarenakan perdebatan yang ada dalam Hukum Internasional menyatakan batasan peran dan fungsi PMCs dapat dipercayakan kepada negara, meskipun secara eksplisit dan implisit. Sehingga kualifikasi PMCs sebagai tentara bayaran masih menjadi isu kontroversial. Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an menjadi pemicu berkembangnya industri PMCs. Demiliterisasi besar-besaran angkatan bersenjata menyebabkan banyaknya tentara profesional yang kehilangan pekerjaan dan kembali ke masyarakat sipil. Banyaknya tentara profesional yang kehilangan pekerjaan akibat demiliterisasi dan pemotongan anggaran angkatan bersenjata dimanfaatkan untuk mendirikan perusahaan militer swasta sebagai lapangan kerja baru.

Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain mengurangi anggaran militer yang besar, korban dari pertempuran tidak akan sepenuhnya

melemahkan pasukan militer asli dari pihak negara kontraktor, dan kekuatan yang disewa terjamin kualitasnya, dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwa pasukan PMC masih berada dalam zona abu-abu dalam hukum internasional karena mereka tidak tergolong secara resmi dalam pasukan perang negara pengguna. Penggunaan PMC juga memiliki risiko atau dampak negatif seperti dipantau secara rutin dan dipertanyakan hukumnya dalam ranah internasional dan adanya tuntutan pertanggungjawaban atas penggunaan PMC tersebut.

Penggunaan jasa PMC juga berpotensi mendorong negara lain untuk ikut serta menggunakan jasa tersebut dalam konflik bersenjata sebagai alat penyeimbang kekuatan antar negara. Regulasi PMC masih berada pada wilayah abu-abu dalam konflik internasional, legalitas PMC biasanya dipertanyakan dalam skenario dimana personel PMC yang ditugaskan dalam suatu konflik terlibat dalam suatu insiden maupun kecelakaan yang menimbulkan kebingungan mengenai tuntutan tanggung jawab.

Alasan lainnya mengapa skenario tersebut termasuk dalam wilayah abu-abu dikarenakan pasukan tersebut tidak secara resmi merupakan bagian pasukan yang sah milik negara pengguna jasa PMC tersebut. Mengingat bahwa pasukan PMC merupakan kepemilikan oleh perusahaan penyedia jasa tersebut dan keterlibatan pasukan PMC semata-mata didasarkan oleh kontrak dengan negara pengguna. Penggunaan PMC oleh negara besar, terutama oleh negara yang sudah memiliki kekuatan militer yang kuat seperti AS menjadi perhatian utama. Oleh karena itu diperlukan suatu regulasi yang secara khusus bisa digunakan untuk mengikat PMC dalam peraturan internasional secara sah dan tepat. Menurut Stanger, diperlukan perubahan pada hukum internasional dan lembaga internasional untuk menjawab tantangan hukum yang ditimbulkan oleh sektor perusahaan PMC.

Situasi politik di Irak pasca Invasi Amerika lepas dari kenyataan antara para pendukung Saddam dan pihak yang menentangnya, seperti antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, antara suku Kurdi dan suku-suku lain yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan Irak. Meskipun saat ini

telah terdapat pemerintahan darurat dari hasil aklamasi rakyat, namun hal itu memperbaiki situasi perpolitikan yang demokratis di Irak. Pertarungan dan konflik tiga kelompok di Irak membuat Amerika Serikat turut serta dalam permasalahan tersebut dan membuat Amerika melakukan intervensi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Amerika menurunkan pasukannya untuk melindungi dan membangun pangkalan militer Amerika di Irak dan setiap tahun mengirimkan tentaranya, baik tentara nasional dan tentara bayaran atau yang lebih sering disebut Perusahaan Militer Swasta (Private Military Company).

PMC yang dikontrak oleh Amerika Serikat kepada beberapa kontraktor atau perusahaan militer swasta yang ada di Amerika Serikat. Invasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pembangunan yang sedang berlangsung di Irak. Rekonstruksi yang dimaksud sebenarnya rekonstruksi yang beririsan antara korporasi yang menyewa mereka dengan PBB. Bagi para korporasi yang menyewa mereka, tujuan dari aktivitas mereka yang akan menjamin keberlangsungan investasi energi dinegara itu, tentu saja hal ini sangat jelas.

Keberadaan Amerika di Irak pasca invasi menimbulkan banyak permasalahan yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Tercatat sebanyak 40.000 tentara Amerika Serikat dikirim untuk misi invasi ke Irak dimulai dari tahun 2003 hingga 2011 dan 1800 tentara bayaran dari beberapa perusahaan militer swasta. Tercatat banyaknya korban kurang lebih 4000 korban tewas yang telah dialami oleh tentara nasional Amerika, hal itu mengakibatkan banyaknya kecaman keras dari masyarakat Amerika terutama bagi keluarga yang memiliki anak atau saudara yang menjadi tentara dan bertugas di Irak menuntut segera pemulangan tentara nasional Amerika Serikat kembali ke tanah airnya dan membiarkan Irak untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya sendiri.

Permintaan yang sangat sulit diwujudkan ketika Amerika masih di pimpin oleh Presiden George W. Bush, sampai akhirnya kepemimpinan beralih ke tangan Barack Obama sebagai Presiden kulit hitam pertama di tahun 2010/2011 dan mulai menemukan titik terang yang dimana setelah bertahun

tahun perdebatan tentang memulangkan dan mendemiliterisasi tentara Amerika yang ada di Irak bisa terwujud. Tentara Amerika Serikat secara berangsur ditarik kembali ke Amerika Serikat dan sebagiannya sudah di demiliterisasi oleh pemerintah demi mengurangi anggaran negara. Namun ketika memulangkan tentara Amerika dari Irak, Amerika malah menambah personil PMC dan memperpanjang kontrak dengan beberapa perusahaan militer swasta yang ada di Amerika.

pemerintahan Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memberdayakan jasa PMC dalam melaksanakan kebijakan tersebut demi mempertahankan beberapa kepentingannya di Irak. Banyak yang tidak tahu bahwa, Private Military Companies (PMC) merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan data intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan perawatan. Kehadiran PMC sebagai bagian dari konteks permasalahan di atas. Mereka (tentara bayaran) menjadi bukti betapa besarnya ambisi ekonomi AS untuk menguasai minyak Irak. Pemerintah Amerika Serikat menyewa jasa tentara bayaran melalui perusahaan penyedia tentara bayaran untuk mengamankan investasi perusahaan asal Amerika Serikat yang ada di Irak. Selain itu, personil PMC ini juga di sewa untuk menjaga aset politik pemerintah Amerika Serikat di Irak.

Kekalahan Irak pada Perang Teluk I dalam perebutan wilayah di Kuwait tidak mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein atas Irak. Konflik bersenjata antara AS dengan sekutu melawan Irak berlanjut pada perang Irak tahun 2003 dengan tujuan utama perang tersebut untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein, tuntutan agar Saddam meninggalkan Irak, dan potensi adanya senjata kimia. Perang Irak terjadi pada bulan Maret 2003 dan juga dikenal sebagai Perang Teluk II (Persian Gulf War II). Sebelum invasi ke Irak, AS menjadi target serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001, peristiwa ini ikut memicu perang Irak. Serangan terorisme tanggal 11 September 2001 merupakan salah

satu faktor pemicu yang berperan dalam meyakinkan para aktor pembuat keputusan AS bahwa diperlukan perubahan-perubahan terhadap beberapa rezim serta penanganan negara-negara yang berpotensi memiliki hubungan dengan terorisme.

Untuk itu, AS harus merubah rezim atau status quo penguasa yang sedang berkuasa di berbagai negara di timur tengah dengan kondisi bahwa pemegang kekuasaan tersebut memiliki hubungan atau jaringan tertentu dengan terorisme. Contoh perubahan status quo adalah pemberhentian rezim kekuasaan Saddam Hussein yang diisukan memiliki senjata pemusnah massal, keterlibatannya dalam invasi Kuwait, dan dianggap memberikan inspirasi pada para teroris untuk terus melakukan perlawanan.

Meskipun Irak tidak terlibat langsung dalam penyerangan insiden 11 September, hal ini tidak menghalangi intervensi AS untuk merubah status quo di Irak. Kesimpulannya, setelah terjadinya serangan terorisme tersebut Presiden George W. Bush mendeklarasikan kampanye perang terhadap terorisme pada tanggal 13 November 2001. Presiden Bush memberikan tanggapan bahwa serangan 11 September adalah tindakan terorisme internasional dan mendeklarsikan perang kepada pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden serta para pengikutnya. Pemerintahan Bush juga menegaskan bahwa mereka memiliki wewenang untuk menahan setiap anggota al Qaeda dan siapapun yang dicurigai mengancam keamanan nasional.

AS telah mengidentifikasi beberapa negara yang dianggap sebagai poros kejahatan (Axis of Evil) dan diduga memiliki potensi terorisme antara lain adalah Irak, Iran, Suriah, Libya, Kuba. Dapat diartikan bahwa perang melawan terorisme (War on Terror) sebagai kampanye yang mendeklarasikan perang atau konflik bersenjata dengan cakupan ruang lingkup target yang hampir tak terbatas. Tujuan dari kampanye pemberantasan teror ini adalah rantai terorisme yang dimiliki Al-Qaeda. Beberapa negara di timur tengah seperti Irak dan Afghanistan misalnya sebagai contoh negara yang menjadi sasaran dengan masing-masing alasan tertentu. Irak menjadi sasaran karena rezim Saddam

Hussein dianggap sebagai ancaman berbahaya bagi AS dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal, sedangkan Afghanistan menjadi sasaran karena rezim kelompok Taliban yang saat itu memiliki koneksi dengan jaringan teror Al-Qaeda.

Perang melawan terorisme semakin meluas antara AS dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang dianggap sebagai poros kejahatan. Pada tahun 2002, dibawah pemerintahan Bush, AS yakin bahwa negara mereka sangat rentan terhadap serangan terorisme. Bush ingin memberantas terorisme sampai ke akarnya. Tujuan kampanye kontra terhadap terorisme Bush adalah menghentikan rantai terorisme Al-Qaeda. Negara Irak dan Afghanistan adalah contoh negara yang menjadi target tersebut. Irak diincar karena rezim Saddam Hussein dinilai berbahaya bagi AS dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal atau WMD (Weapons of Mass Destruction), sedangkan Afghanistan diincar karena rezim kelompok Taliban yang berada disana memiliki koneksi dengan jaringan teror Al-Qaeda pada waktu itu.

Pendapat AS perihal kepemilikan senjata tersebut awalnya didasarkan permasalahan bahan kimiawi nuklir yang dimiliki Irak, tepatnya pada akhir tahun 1999, dimana Menteri Pertahanan AS Bill Cohen yang waktu itu berada dalam masa pemerintahan Presiden Bill Clinton berpendapat bahwa Irak masih berusaha mengumpulkan bahan nuklir dan mendesak agar pengawasan maupun penyelidikan oleh PBB di Irak diteruskan sebagai langkah pencegahan. Dari data tersebut pendapat atau tuduhan Bush mengenai kepemilikan WMD oleh Irak bukanlah hal yang baru karena bahaya potensi senjata kimiawi maupun nuklir Irak merupakan permasalahan yang sudah ada di masa lalu dan masih belum terselesaikan.

Pada akhirnya dilakukan upaya penyelidikan keberadaan senjata tersebut yang tidak hanya dilakukan oleh AS, tetapi juga dengan bantuan badan khusus penyelidik yang dikerahkan oleh PBB yaitu United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) badan tersebut diberikan tugas sesuai dengan resolusi no 1284 terkait penyelidikan bahan

maupun tempat-tempat yang dicurigai sebagai sumber senjata pemusnah masal tersebut (United Nations Security Council Resolution 1284. Tahun 1999).

Dari catatan inspeksi UNMOVIC di New York, terlihat jelas bahwa beberapa lokasi yang dicurigai sebagai penyimpanan WMD adalah fasilitas dan laboratorium yang sama dengan yang telah diteliti oleh kelompok inspeksi PBB jauh sebelum invasi Irak dimulai yaitu pada tahun 1990-an. Hasil investigasi muncul pada pertengahan tahun 1990-an, hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah besar program senjata nuklir, kimia, dan biologi Irak telah dihancurkan atau dianggap tidak berbahaya di bawah pengawasan PBB. Pada tahun 1996 terdapat laporan khusus IAEA kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada senjata nuklir yang diproduksi di Irak, bahan-bahan nuklir terlarang telah dikeluarkan dari negara itu, dan bahwa tidak ada program senjata nuklir rahasia yang ditemukan.

Pada tanggal 17 Maret 2003, dengan menganggap bahwa upaya penyelesaian secara diplomatik lebih lanjut oleh Dewan Keamanan sia-sia karena Saddam tidak mau meninggalkan Irak meskipun ada tuntutan AS, Bush mengumumkan mengakhiri hubungan diplomatik dan mengeluarkan ultimatum kepada Saddam dalam 48 jam agar Saddam Hussein meninggalkan Irak. Tuntutan dan ultimatum perang tersebut hanya diusulkan oleh AS, keputusan untuk berperang melawan Irak didukung oleh beberapa negara besar yang setuju mengenai penggunaan kekuatan militer kepada Irak yaitu Inggris, Polandia, dan Australia dengan alasan yang sama yaitu mendukung AS memerangi Irak adalah bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dunia (world order).

Sementara pihak-pihak yang menentang terjadinya perang terhadap Irak adalah dua negara besar dari Eropa yaitu Perancis, dan Jerman. Alasan utama kedua negara tersebut menentang eskalasi perang yang semakin meningkat antara AS dengan Irak disebabkan preferensi kedua negara tersebut yang berharap konflik antara AS Irak dapat melalui penyelesaian masalah secara diplomatik (damai) dari pada peperangan. Namun pada akhirnya, meskipun

terdapat perbedaan pendapat mengenai cara penyelesaian konflik antara AS-Irak dimana negosiasi diplomatik dan perang menjadi pilihan, perang Irak tetap terjadi pada tahun 2003. Perang tersebut dimulai pada tanggal 19 Maret karena Saddam menghiraukan ultimatum dan menolak untuk meninggalkan Irak.

Banyak negara seperti Perancis dan Jerman berpendapat akan lebih baik jika ada perdamaian secara diplomatik bisa dicapai antara AS dengan Irak. Sesaat sebelum perang terjadi, negara-negara lain melakukan berbagai upaya untuk mengubah pandangan AS terkait perang. Perdana Menteri Jacques Chirac misalnya, dalam wawancara pada tanggal 9 September 2002, Chirac mengatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak memerangi Irak lewat keputusannya sendiri tetapi harus mempertimbangkan konsultasi dengan Dewan Keamanan PBB. Pada wawancara tersebut Perdana Menteri Jacques Chirac juga berupaya untuk mengingatkan AS bahwa keputusan militer (perang) harus diputuskan secara bersama dan bukan lewat keputusan AS sendiri.

Chirac berpendapat bahwa menyerang Irak merupakan alternatif terakhir yang harus dihindari apabila memungkinkan. Selain itu keputusan untuk memerangi Irak harus koheren (bersatu) lewat keputusan Dewan Keamanan PBB. Namun pada akhirnya perang antara AS-Irak tidak terhindarkan dan perang terjadi pada tanggal 19 Maret 2003, diawali dengan operasi militer AS yang menandakan awal mula perang dengan nama "Operation Iraqi Freedom". Pasukan koalisi memulai penyerangan lewat bagian selatan Irak, terdapat dua divisi pasukan penyerang, regu pertama adalah pasukan pesawat perang yang bertugas melumpuhkan pasukan artileri (meriam) Irak.

Regu darat akan melanjutkan serangan setelah regu pesawat perang. Hal tersebut dikarenakan pasukan artileri menjadi masalah utama bagi regu darat AS. Pertempuran memuncak ketika pasukan koalisi mencapai Baghdad, tempat para pendukung Saddam dan partai sosialis Ba'ath Irak (partai yang dipimpin Saddam Hussein) melakukan perlawanan terakhir dalam mempertahankan Irak. Pertempuran di Baghdad berlangsung dari tanggal 21 Maret hingga 9 April 2003, dimana perlawanan Baghdad runtuh dan dimenangkan oleh pasukan

sekutu.

Kekalahan Saddam Hussein dan pasukan perlawanan Irak menyebabkan para petinggi Irak terutama Saddam Hussein untuk melarikan diri dari Baghdad dan bersembunyi. AS secara resmi mengumumkan berakhirnya perang di Irak pada 1 Mei 2003. Keberadaan Saddam tidak diketahui selama berbulan-bulan hingga pada akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003 di kota Ad-Dawr, Tikrit, Irak. Setelah penangkapan Saddam tidak ditangani oleh AS tetapi diserahkan langsung kepada pihak otoritas Irak pada Juni 2004 untuk diadili atas berbagai kejahatan yang dilakukan. Saddam didakwa atas tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dieksekusi pada tanggal 30 Desember 2006.

Sebelum terjadinya perang Irak, terdapat konflik bersenjata yang merupakan pendahulu (Prelude) dan merupakan bagian dari awal konflik antara AS dengan Irak sebelum perang Irak pada tahun 2003. Untuk itu akan dijelaskan mengenai konflik awal yaitu invasi Kuwait. Invasi tersebut terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, ketika pasukan Irak menginvasi dan menduduki Kuwait. Invasi bermula dari tuduhan Irak bahwa Kuwait dicurigai melakukan pencurian penambangan oli petroleum. Invasi Kuwait langsung menuai kecaman internasional dan memicu terbentuknya aliansi internasional oleh negara-negara lain yang mendukung Kuwait seperti AS. Amerika bersama dengan pasukan negara aliansi seperti Australia, Inggris, Prancis, Arab Saudi, dan berbagai negara pendukung Kuwait, berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 pasukan bersenjata. Persiapan tersebut dilakukan dengan tujuan membebaskan Kuwait.

Tepatnya pada awal bulan September dan akhir Desember tahun 1990. Tujuan penyerangan Irak ke Kuwait dapat dilihat dari beberapa hal yang dapat diperhatikan. Pertama, sengketa oli antara Irak dengan Kuwait bermula dari tuduhan Irak bahwa Kuwait mengeksploitasi ladang minyak utama Irak yaitu Rumalia, yang merupakan wilayah penambangan terbesar milik Irak. Selain itu perlu diketahui juga bahwa Irak dan Kuwait merupakan sesama negara yang

memiliki persediaan oli petroleum di teluk Persia (Persian Gulf), minyak di teluk tersebut ditetapkan sebagai minyak utama dunia dengan persediaan yang jauh melebihi persediaan jumlah cadangan minyak Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menjadikan kawasan ini memiliki potensi pasokan minyak yang besar. Kedua, Kuwait sebelumnya memberikan pinjaman untuk perang bernilai miliaran dolar terhadap Irak sebagai biaya perang Irak-Iran, yang terjadi antara pada tahun 1980-1988.

Tujuan dan maksud keputusan Irak untuk menginvasi Kuwait didasarkan pada kepentingan ekonomi negaranya, seperti yang ditunjukkan oleh manfaat ekonomi yang diperoleh oleh Irak dari menginvasi Kuwait. Keuntungan ekonomi lainnya termasuk penghapusan hutang perang Irak-Iran dan penggandaan produksi minyak berkat menduduki Kuwait. Konflik antara AS dengan Irak untuk invasi ke Kuwait dikenal dengan nama Perang Teluk I (Persian Gulf War I). Sebelum konflik antara pasukan aliansi dan Irak terjadi, pada tanggal 3 Agustus Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Irak untuk menarik diri dari Kuwait, dan pada 6 Agustus dewan tersebut memberlakukan sanksi ekonomi dalam bentuk embargo global untuk bisnis dengan Irak di seluruh dunia . Irak menanggapi sanksi ini dengan semakin memperluas dan mempertahankan posisinya di Kuwait. Karena situasi di Kuwait tidak berubah dengan adanya ultimatum sanksi ekonomi, maka Dewan Keamanan PBB memberikan hak penggunaan kekuatan (The use of force) kepada pasukan aliansi untuk melakukan operasi pembebasan di Kuwait. Pemberian hak penggunaan kekuatan tersebut terjadi pada tanggal 29 November 1990 dan Irak diberi batas waktu untuk meninggalkan Kuwait maksimal pada tanggal 15 Januari 1991.

Ultimatum penggunaan kekuatan oleh pasukan aliansi tidak menghentikan pendudukan Irak di Kuwait. Irak mengabaikan ultimatum tersebut kemudian sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam ultimatum tersebut pada tanggal 15 Januari 3 tahun 1991, pasukan aliansi yang semula mengumpulkan 600.000 pasukan, kini telah bertambah jumlahnya menjadi

700.000 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari 540.000 pasukan AS dan sejumlah kecil dari negara aliansi seperti Inggris, Prancis, Mesir, Saudi, Suriah, dan berbagai negara lainnya. Serangan militer aliansi terhadap Irak dimulai pada 16 Januari 1991 dan menandai dimulainya Perang Teluk I.

Pasukan aliansi fokus pada serangan udara dan target utama mereka adalah pertahanan Irak. Pada masa invasi Kuwait, perbedaan teknologi militer antara pasukan Irak dan pasukan aliansi terlihat dari perbedaan perlengkapan persenjataan misil diantara kedua pihak. Persenjataan AS adalah Rudal atau misil yang merupakan rudal Cruise tipe 1980an yang dibawa oleh kapal perang AS sedangkan senjata Irak adalah rudal model misil Scud yang lebih tua dibandingkan milik AS yaitu model tahun 1950-an. Kekuatan jarak misil tipe Cruise yang dimiliki AS dapat mencapai jarak hingga 2.400 km dengan radius akurasi 50m sedangkan misil Scud Irak hanya memiliki jangkauan 500 km. Saddam Hussein juga sempat mengarahkan misil Scud nya kearah Israel dengan harapan mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab dan memberikan tekanan pada pasukan sekutu, namun tindakan ini tidak mempengaruhi situasi Perang Teluk pada saat itu. Setelah perang misil berakhir, pertempuran berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu pertempuran antara pasukan darat sekutu melawan Irak.

Tahap akhir ini adalah bagian dari operasi gabungan pasukan sekutu yang dinamakan "Operation Desert Sabre" dimana kendaraan bersenjata sekutu dimajukan sebagai dorongan akhir pada pertahanan Irak di Kuwait. Serangan tersebut merupakan serangan darat terbesar yang diluncurkan oleh pasukan sekutu. Operasi ini dimulai pada tanggal 24 Februari, dan pada tanggal 27 Februari, pasukan sekutu telah menghancurkan dan memukul mundur sebagian besar pasukan Irak. Saat itu, Presiden Bush mengumumkan gencatan senjata pada 28 Februari 1991 dan mengakhiri perlawanan Irak di Kuwait.

Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa perlawanan dari Irak telah runtuh sepenuhnya. Berakhirnya pertempuran di Kuwait bukan berarti berakhirnya konflik AS-Irak, hal tersebut dikarenakan rezim Saddam Hussein

yang masih aktif dalam pemerintahan Irak. Korban pasukan perang dari sekutu berjumlah 148 dari pasukan AS, 24 dari pasukan Inggris, 2 dari Perancis, 39 dari negara sekutu Arab (Mesir, Arab Saudi, dsb). Sementara itu, korban dari pasukan Irak diperkirakan lebih dari 100.000 tentara Irak yang tewas dalam pertempuran Kuwait. Sekitar 300.000 luka-luka, 150.000 tentara yang masih tersisa dan 60.000 ditawan. Setelah berakhirnya invasi pada Kuwait dan Perang Teluk I menandai dimulainya tahap konflik bersenjata selanjutnya antara Irak dengan AS terutama konflik terkait senjata kimia dan tuntutan AS dalam pemberhentian kekuasaan rezim Saddam Hussein atas Irak.

KESIMPULAN

Keterlibatan Private Military Company dalam operasi pembebasan atau yang lebih dikenal sebagai tindakan invasi terhadap negara Irak pada masa rezim Saddam Hussein dianggap sebagai salah satu tindakan yang berperan penting dalam invasi tersebut, karena banyaknya personel atau kontraktor Private Military Company turun ke medan perang ketika invasi berlangsung, peran Private Military Company yang turun ke medan perang hanya diketahui beberapa pihak sebagai bentuk dukungan dan bantuan dalam penyediaan keperluan yang dibutuhkan oleh pihak militer Amerika Serikat namun tidak jarang kontraktor tersebut ikut dalam aksi baku tembak dan misi pembebasan negara Irak yang sering mereka tekankan terhadap publik.

Amerika Serikat berhasil menuntaskan tujuan yang mereka lakukan kepada negara Irak, lalu pemimpin Irak yaitu Saddam Hussein juga berhasil dihukum mati sesuai aturan hukum yang berlaku namun keberadaan militer Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap negara Irak masih sangat kental dan dianggap sebagai pendudukan kekuasaan di negara Irak itu sendiri. Pihak Amerika Serikat menganggap aksi tersebut salah satu bentuk bantuan dan tanggung jawab selepas perang, dalam hal ini peran yang dilakukan Amerika

Serikat adalah membentuk pemerintahan baru yang di latar belakang oleh Amerika Serikat dan dilandasi oleh Demokrasi.

Peran Private Military Company di Irak dikaitkan dalam bentuk bantuan penanganan dan penyaluran bantuan kebutuhan perang secara langsung yang dimana Private Military Company terjun langsung dalam medan perang lalu ikut mengamankan pengiriman pasokan perang hal ini serupa dengan tindakan yang dilakukan oleh Private Military Company ketika beroperasi di Irak pasca invasi. Pengaruh militer Amerika Serikat di Irak semakin dipertanyakan karena dengan berakhirnya invasi dan pendudukan militer Amerika Serikat di Irak lantas jumlah korban yang dialami oleh personel tentara Amerika Serikat juga terus ada dan tidak tampak tujuan sebenarnya tentang keberadaan tentara Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Fadillah. 2007. Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Elsam.

Haryomataram, GPH. 1984. Hukum Humaniter. Jakarta: CV. Rajawali.

Schulz, Sabrina dan Christina Yeung. 2008. Private Military and Security Companies and Gender. Gender and Security Reform Toolkit. Geneva : DCAF.

Jurnal

Cameron, Lindsay. 2006. "Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya". International Review of the Red Cross. Vol. 88.

Carney, Heather. 2006. "Prosecuting the lawless: Human rights abuses and private military firms". George Washington Law Review. Vol. 74.

Faite, Alexandre. 2004. "Involvement of Private Contractors in Armed Conflict: Implications Under International Humanitarian Law". Defense Studies. Vol. 4.

Fallah, Katherine. 2006. "Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata". International Review of the Red Cross. Vol. 88.

Makalah

Caparini, Maria dan Fred Schreier. 2005. *Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies*. Occasional Paper. Geneva : DCAF.

International Committee of the Red Cross. 2007. *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Arm Conflict*. Dokumen disampaikan pada 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26-30 November 2007.

Website

Brooks, Doug. 2002. *Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, diunduh dari International Peace operations Association (IPOA), dalam <http://stability-operations.org/>, 25 Juli 2002, diunduh pada 1 Februari 2013.

ICRC. 2009. *The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict*. Geneva: International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs, dalam <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>, diunduh pada 29 Januari 2013.

Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran, 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001, dalam <http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>, diunduh pada 2 Februari 2013.

Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985), dalam http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention_on_Mercenaries.pdf, diunduh pada 5 Februari 2013.

Nelson, Sara C. "Syria Uprising: Mossad, Blackwater And CIA Led Operations In Homs", dalam http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/03/07/syria-uprising-mossad-blackwater-and-cia-led-operations-in-homs_n_1326121.html, 7 Maret 2012, diunduh pada 28 Januari 2013.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2007. *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*. Paris: OECD Publishing, dalam

<http://www.oecd.org/development/conflictandfragility/38406485.pdf>,
diunduh pada 29 Januari 2013.

Scahill, Jeremy. "The Secret US War in Pakistan", dalam <http://www.thenation.com/article/secret-us-war-pakistan>, 23 November 2009, diunduh pada 29 Januari 2013.

Schork, Kurt. "Hors de combat", dalam <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/hors-de-combat/>, tanpa tanggal, diunduh pada 28 Januari 2013.